DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aliminsyah dan Padji, 2003, "*Istilah Keuangan dan Perbankan",* Jakarta; Penerbit Erlangga.

Amalia, Lia, 2007,*"Ekonomi Internasional",* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *"Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum"*

F.X. Suhardana, 2001, "*Hukum Perdata I Buku Pedoman Mahasiswa*", Jakarta, PT Prenhallindo.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"* Bandung: Remaja Rusdakarya.

Lindert, Peter H, 1991, "*International Economics*". USA: Richard D.Irwin Inc.

Martina Ratna Paramitha Sari, 2013, *Skripsi: Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Mohamad Samsul, 2010, *Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia*, DIE Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 6 Nomor 2. Januari.

Pantas Lamban Batu, 2010, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading",* Jakarta, PT: Elex Komputindo.

Philipus M.Hadjon, 1987, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia"*, Jakarta:Bina Ilmu.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, "*Kamus Istilah Perbankan*", Jakarta; Atalya Rileni Sudeco.

Satjipto Raharjo, 2006, *"Ilmu Hukum"*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1993, *"Pengantar Penilitian Hukum"* , Jakarta: UI.

Sri Maudji, 2005, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum",*Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Pemerintah Indonesia, 2011. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tambahan Lembaran Negara RI 2003, No. 4288. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Pemerintah Indonesia, 1992. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tambahan Lembaran Negara RI 1992, No. 4372. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Putusan Bank Indonesia Nomor 18.40/PBI/2016 Tahum 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

C. Lain – Lain

http://tekno.kompas.com/read/2014/04/06/1203132/4.tantangan.bisnis.e-commerce.di.indonesia, diakses pada 18 Februari 2021.

Indodax.com, diakses tanggal 6 Maret 2021

Liber Sonata, Depri, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: karakteristik Khas Dari Metode Meneliti *hukum”* , Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 Januari, 2014.